



WEBINAR NASIONAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA INDONESIA MAU DIBAWA KE MANA?

| Rabu, 22 Juli 2020, Pukul: 13.30 – selesai



DINNI MELANIE, S.H., M.E.
Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG



20 TAHUN CAPAIAN KPPU



TANTANGAN KPPU



LANGKAH KE DEPAN



LATAR BELAKANG



Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4)

- perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas **demokrasi ekonomi** dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

- Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008

- Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

TUGAS KPPU

KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat

ADVOKASI
KEBIJAKAN

PENEGAKAN
HUKUM

KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis

Melalui perkuatan di PP No. 57/2010, KPPU memiliki kewenangan untuk menerima dan mengevaluasi merger yang dinotifikasi dan dikonsultasikan

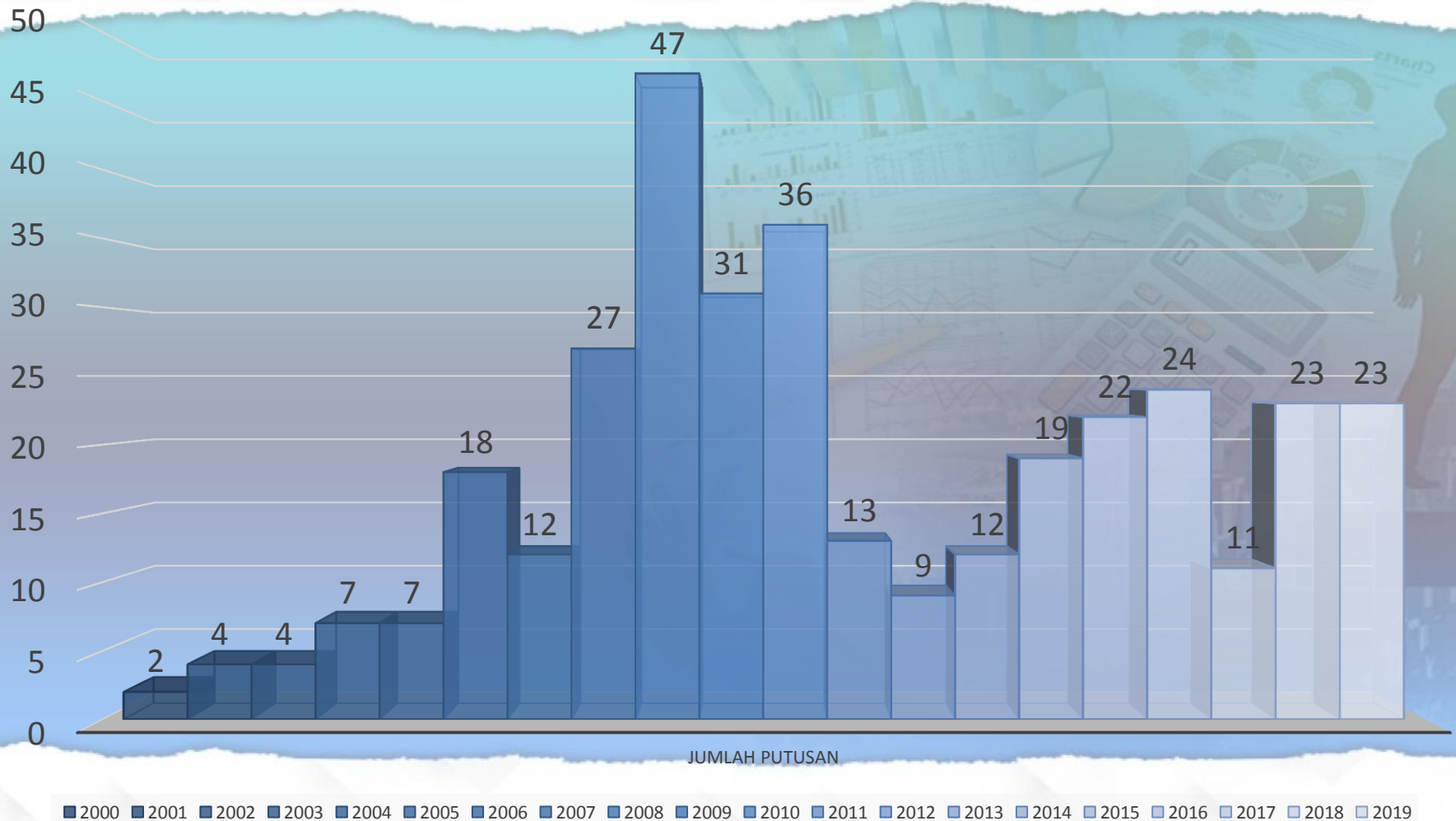
PENGENDALIAN
MERGER

PENGAWASAN
KEMITRAAN

Melalui UU No. 20/2008 jo PP No. 17/2013, KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM

CAPAIAN KPPU DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN

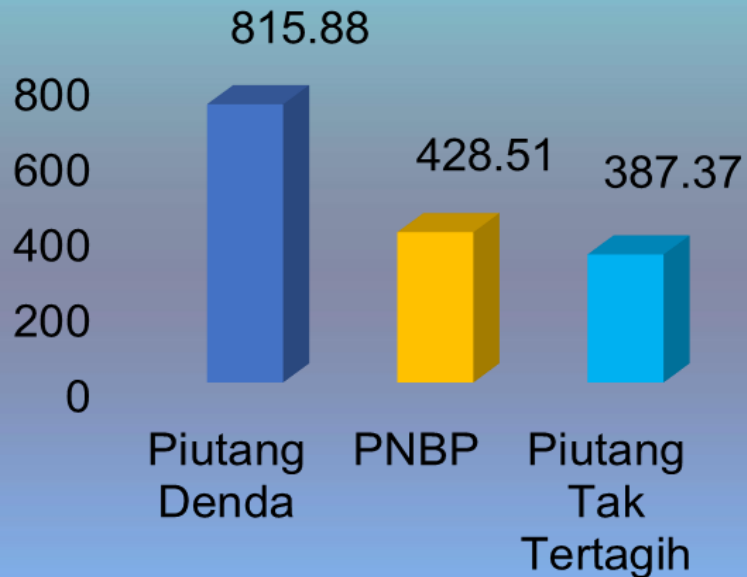
Jumlah Putusan Perkara 2000 – 2019
Total 351 Perkara



REKAPITULASI DENDA PERSAINGAN USAHA

Per: 2001 s.d 15 Juli 2020

Piutang Denda (miliar)



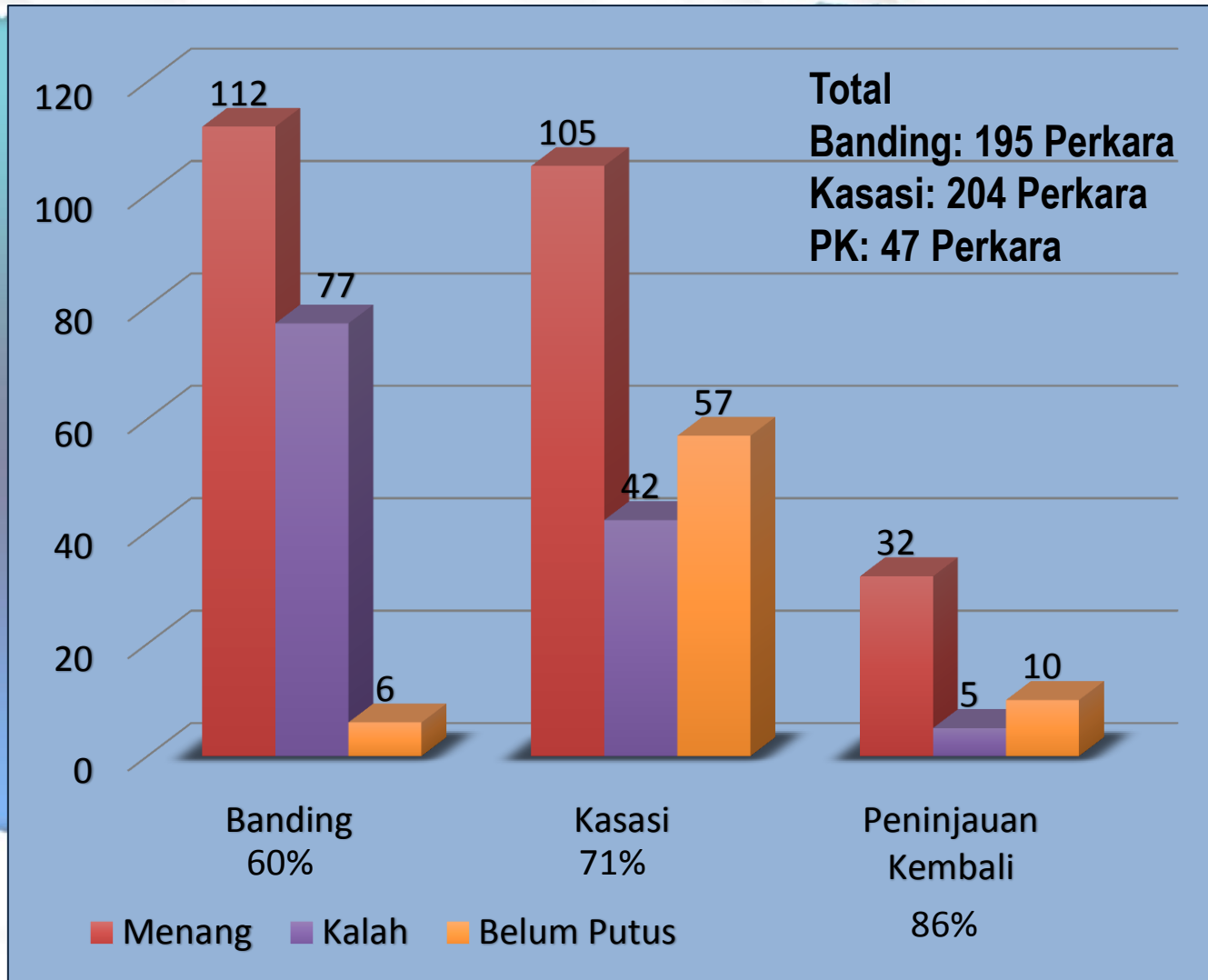
Summary Eksekusi s.d 15 Juli 2020

Jumlah Putusan Inkracht per 15 Juli 2020	160 Putusan
Jumlah Terlapor Putusan Inkracht per 15 Juli 2020	573 Terlapor
Jumlah Putusan yang Belum Dilaksanakan per 15 Juli 2020	94 Putusan
Jumlah Terlapor yang Belum Menjalankan Putusan per 15 Juli 2020	318 Terlapor
Jumlah Piutang Inkracht per 15 Juli 2020	Rp 815,875,972,815
Jumlah Penerimaan per 15 Juli 2020	Rp 428,512,549,457
Jumlah Penerimaan periode 15 Juli 2020	Rp 39,455,575
Jumlah Penerimaan Januari s.d 15 Juli 2020	Rp 21,756,508,760
Saldo Piutang per 15 Juli 2020	Rp 387,373,426,024

KPPU telah menyumbang PNBP kepada Negara sebesar
Rp 428.51 Miliar (52 %)

REKAPITULASI UPAYA KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU

Periode 2000 s.d Juli 2020



PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

MELAKSANAKAN DUE PROCESS OF LAW

PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM

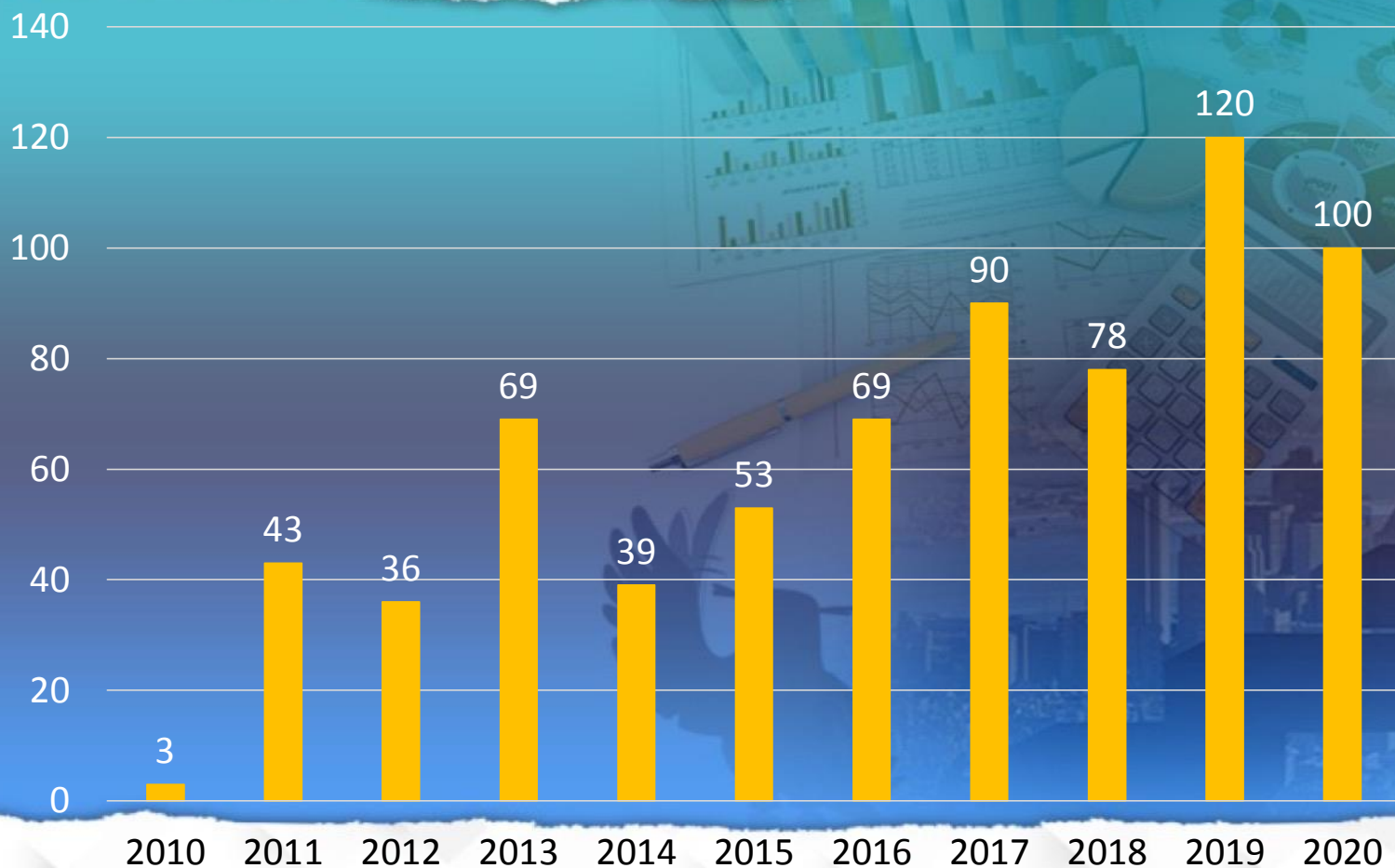
MENJAMIN HAK-HAK TERLAPOR

**AKUISISI ASET DALAM PERATURAN KPPU TENTANG
MERGER DAN AKUISISI**



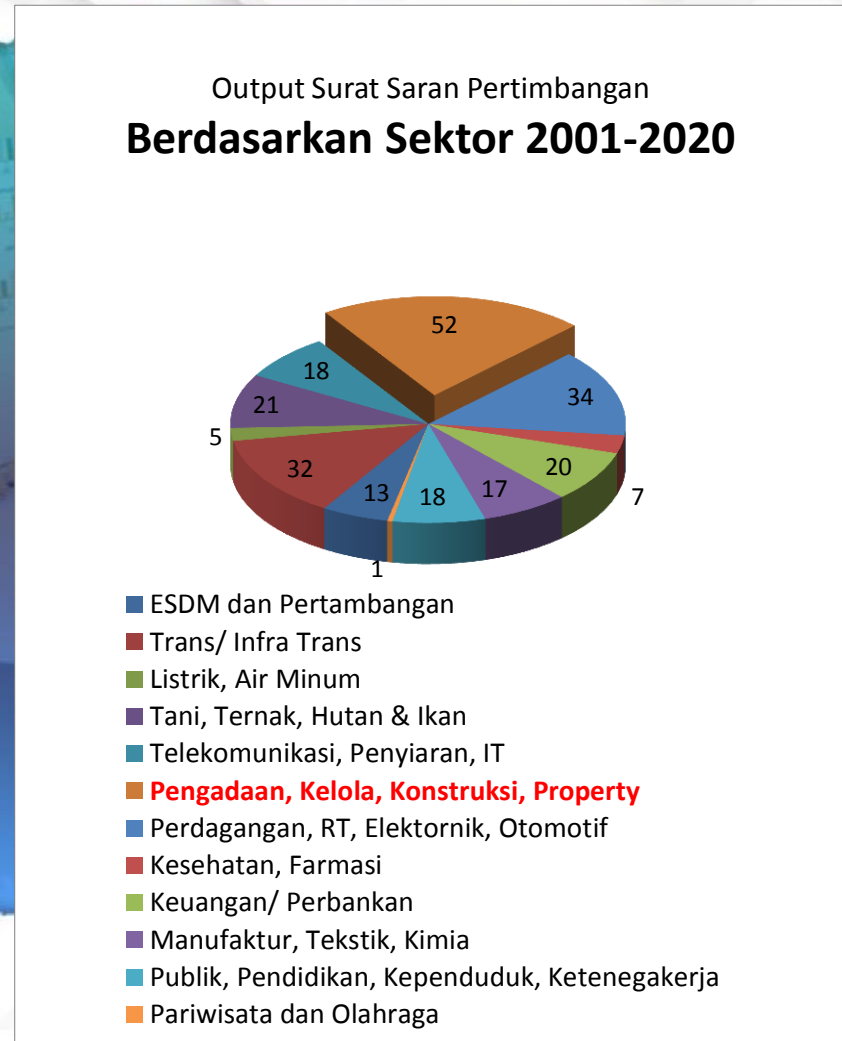
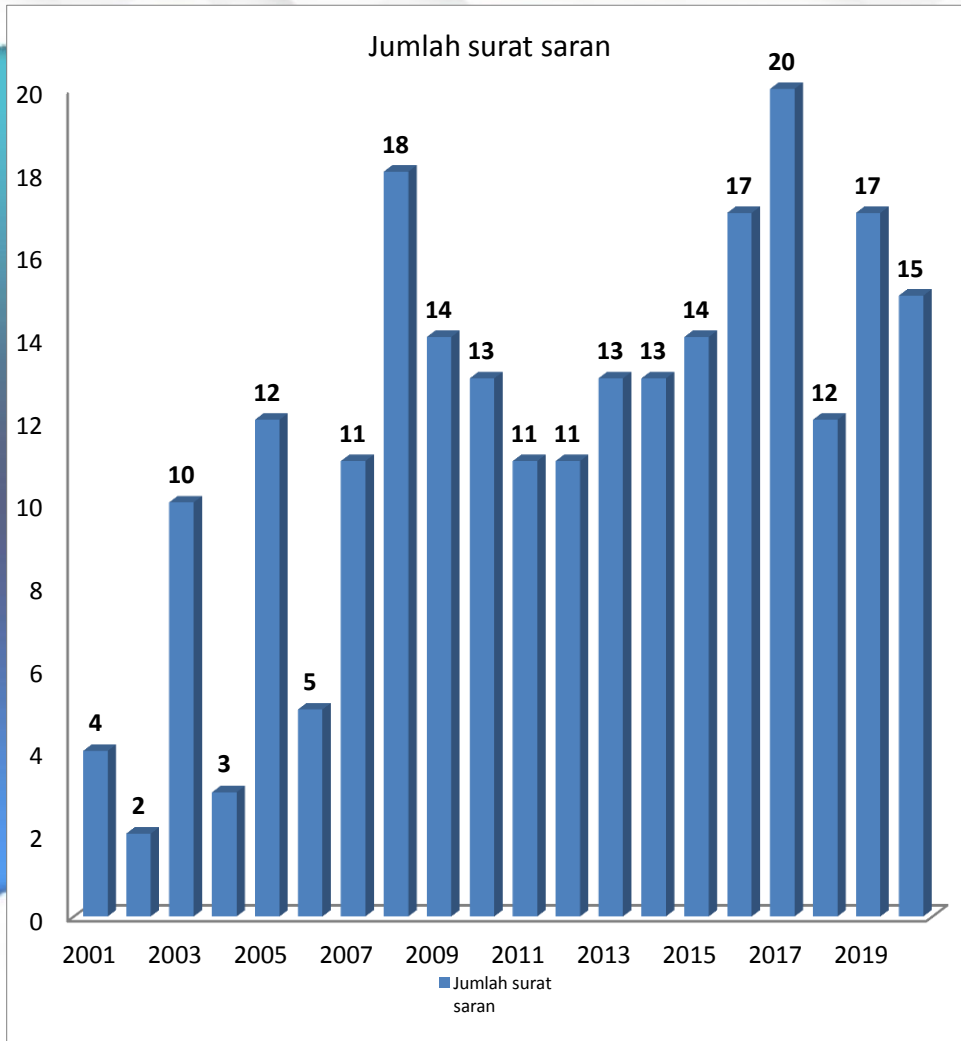
CAPAIAN KPPU **DALAM NOTIFIKASI MERGER** Periode 2010 – Juli 2020

Total 700 Notifikasi Merger



CAPAIAN KPPU DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH

Total 238 Surat Saran dan Pertimbangan



MANFAAT HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN



MITRA PENTING
PEMERINTAH
UNTUK
MENDORONG
INVESTASI DAN
KINERJA SEKTOR

PERSAINGAN
SEHAT DALAM
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA
PERMERINTAH




ADANYA
KEPASTIAN
HUKUM


PENURUNAN
TARIF DI SEKTOR
TELEKOMUNI-
KASI

KOREKSI BAGI
MONOPOLIST
AGAR BERSAING
SEHAT
(PELABUHAN,
BANDAR UDARA,
DLL)

Fairness



MENGGELIAT-
NYA DUNIA
PENERBANGAN
PASCA SARAN
PERTIMBANGAN
KPPU



TIDAK ADANYA
EKSKLUSIFITAS
(BUMN)

KPPU SEBAGAI PENGAWAS KEMITRAAN

KPPU

terus membangun sistem pengawasan kemitraan dan sudah memulai proses penegakan hukum di tahun 2019 sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan sesuai dengan tujuan UU No 5 Tahun 1999

KPPU

berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan Kemitraan sesuai UU No 20 Tahun 2008 dan PP No 17 Tahun 2013 tentang UMKM

Fokus pengawasan:

Larangan pelaku usaha besar/menengah untuk memiliki dan/atau menguasai mitranya yang merupakan pelaku usaha menengah, kecil dan mikro





KIPRAH KPPU DI DUNIA INTERNASIONAL



OECD Competition Committee Meetings;

OECD High Level Representatives Meetings;

UNCTAD Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy Meetings;

International Competition Network (ICN) Annual Conferences;

ASEAN Competition Conferences (ACC);

APEC Competition Policy and Law Group (CPLG) Workshops and Meetings;

ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA) Heads Meetings;

East Asia Top Level Official's Meetings (EATOP) &

East Asia Conferences (EAC);

Global Competition Review (GCR) Annual Asia-Pacific Law Leaders Forum;

OECD KPC – ICN Economist Workshops;

Seoul International Competition Forums;

Hong Kong Competition Commission International Conference;

Taiwan International Conference on Competition Policy and Law;

Manila Competition Forum;

The Russian Competition Week.



Bagian dari
Sistem
Hukum
Indonesia

Mitra
Pemerintah
terkait
Persaingan
Usaha

Bagian dari
Sistem
Ekonomi
Indonesia



Pencapaian
KPPU

Banyak
Tantangan
dan
Hambatan

harus diselesaikan agar
hukum dan kebijakan
persaingan Usaha
Indonesia bisa optimal
perannya ke depan

sebagai landasan
bagi upaya
Perbaikan Hukum
dan Kebijakan
Persaingan melalui
amandemen UU No
5 Tahun 1999

KPPU KOMPETITIF DAN INOVATIF



KOMPID

Kompetisi Usaha Tanpa Diskriminasi

KONDISI DAN TANTANGAN PERSAINGAN (PRESENT AND FUTURE)

Digital Ekonomi

Free Trade Area

Cross Border
Cartel

Multinasional
Merger dan
Akuisisi

Peningkatan daya
saing pelaku
usaha nasional



TANTANGAN KPPU



❖ Kewenangan KPPU

Status Kelembagaan dan status pegawai sekretariat KPPU

Anggaran KPPU

Internalisasi nilai-nilai persaingan dalam kebijakan pemerintah

Dukungan stakeholder

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 5/1999



STATUS
KELEMBAGAAN
KPPU



STATUS
KEPEGAWAIAN
KPPU

PERUBAHAN REZIM
POST NOTIFIKASI
MENJADI PRE
NOTIFIKASI

BESARAN DENDA
PERSAINGAN
USAHA

LENIENSI
PROGRAM

KONSEP
EKSTRATERITORIAL

KEWENANGAN
PENGGELEDAHAN

PENDEFINISIAN
ALAT BUKTI YANG
LEBIH LUAS



ANGGARAN KPPU

- Dukungan anggaran menurun setelah tahun 2019 (**Bukan karena Pandemi Covid**), padahal tuntutan pengawasan persaingan semakin tinggi.



LANGKAH KE DEPAN



AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG



ANGGARAN YANG
IDEAL



PEMAHAMAN
REGULATOR



DUKUNGAN
STAKEHOLDER

Terima kasih

KPPU KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<http://www.kppu.go.id>

DISCLAIMER:

The opinions expressed in this presentation and on the previous slides are solely those of the presenter and not necessarily those of KPPU. All information included here falls under the fair use of the Indonesian law for the openness of public information. The presenter strives for accuracy of any data and information in these slides, but cannot be held responsible for any errors in those featured. Any quotation from the slides is allowable by mentioning or referring to the source. Thank you.


For more information, annual reports, articles, and other publications, please visit our official web page.

ADDRESS:

KPPU Building
Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta 10120, Indonesia
P. +6221-3507015/16/49
F. +6221-3507008
E. infokom@kppu.go.id
E. international@kppu.go.id

 KPPUINDONESIA

 @KPPU

 KPPUOFFICIAL



KOMPID

Komisi Pengawas Persaingan Usaha